

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kewenangan	29
B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .	49
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Data Gugatan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi..	59
1. Kronologi Kasus	59

2. Identitas Pemohon	61
3. Alasan Pemohon dalam Permohonan	62
4. Petitum	64
B. Data Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi..	65
1. Perkara Nomor 18/NL/2018	65
2. Perkara Nomor 23/NL/2018	67
C. Data Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi Perkara Nomor 6/NL/2018	70
D. Data Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Perkara Nomor 29/NL/2019.....	74
E. Data Hasil Wawancara	75

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.....	90
1. Faktor Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah	90

2. Faktor Penanganan Perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	99
B. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Terhadap Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	105
BAB V : PENUTUP	
C. Kesimpulan	116
D. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR LAMPIRAN	